



Received 2023-08-25

Revised 2023-09-27

Accepted 2023-10-19

Affiliation:

^{1,2,3}Universitas Bengkulu,
Bengkulu

***Correspondence:**

abdullah@unib.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.24036/wra.v11i2.125087>

How to cite (APA 6 th style):

Doyosi, Riri Putri, Abdullah, Fadli. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten Lebong. *Wahana Riset Akuntansi*. 11 (2), 168-178

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lebong

Riri Putri Doyosi^{1*}, Abdullah², Fadli³

Abstract

Purpose – *This purpose of this study was to examine the accountability of village fund management in terms of accessibility, government internal control system, transparency and use of information technology.*

Design/methodology/approach – *This study used a survey method through the distribution of questionnaires conducted in 49 villages spread across 6 sub-districts in Lebong regency, with a total of 49 village treasurer respondents. The relationship between variables was analyzed using SPSS.*

Findings – *Based on the results of multiple regression analysis shows that 1) Accessibility has a negative influence on the accountability of des fund management. 2) The government's internal control system has a positive influence on accountability of village fund management. 3) Transparency has a positive influence on the accountability of village fund management. 4) Utilization information technology has a positive influence on the accountability of village fund management.*

Originality/value – *This research is aimed at village governments regarding village financial management. This was done to see more clearly the form of accountability of village governments in managing village funds, where there are still many village governments that cannot be accountable for village funds, especially Lebong district. As well as explaining how the government's internal control system, accessibility, transparency and use of information technology explain the accountability of village fund management*

Research limitations/implications – *The limitation of this research is that the statements in the accessibility questionnaire are still inaccurate in explaining the accessibility variables. The implication of this research is to prove that agency theory in line with the variables of accessibility, internal control system, transparency and use of information technology related to accountability village fund management. According to the results of this research, it is hoped that it can provide benefits for the village government as a reference or material for consideration in making decisions regarding the importance of responsible management village funds and as a consideration in making policies for increasing accountability of village funds.*

Keywords: *Accessibility, Accountability of Village Fund Management, Government Internal Control System, Transparency, Utilization of Information Technology.*

Article Type: Research Paper

Pendahuluan

[Permendagri Nomor 20 Tahun 2018](#) mencakup pengelolaan keuangan desa. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa konsep partisipasi, tanggung jawab, dan transparansi digunakan untuk mengatur keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi akuntabilitas keuangan serta perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pelaporan. Hasil tindakan pemerintah desa harus

dipublikasikan sesuai dengan hukum yang berlaku ([Indriasih & Sulistyowati, 2022](#)). Sumber daya anggaran diberikan kepada desa dalam bentuk dana desa dalam rangka mengelola potensi desa dan mendorong pembangunan desa. Hal ini menguntungkan masyarakat karena meningkatkan taraf hidup di pedesaan, ekonomi, dan pembangunan (Hendaris & Siraz, 2020). Kekhawatiran mengenai kemampuan pemerintah desa untuk mengelola uang desa secara efektif diangkat oleh besarnya alokasi anggaran desa.

Masih banyak contoh di mana pemerintah desa tidak bertanggung jawab atas mandat yang telah ditetapkan, tanggung jawab untuk dana lokal yang seringkali tidak konsisten. Pada tahun 2018, Camat Lebong Utara di Desa Nangai Amen disebut sebagai tersangka pencurian keuangan masyarakat. ([bengkulu.bpk.go.id](#)). Tahun 2020 Kepala SiIPA (Sisa Perhitungan Anggaran) sebesar Rp306.000.000 yang dicairkan Desa Gandung Baru tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan ([radarlebong-disway-id](#)). Uang dari desa yang dimaksudkan ialah digunakan untuk pengembangan masyarakat tetapi dibelanjakan secara tidak semestinya untuk kepentingan pribadi oleh pimpinan desa. Skenario ini mengarah pada kesimpulan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kabupaten Lebong masih di bawah standar.

Semua tindakan yang dilakukan oleh perangkat desa dalam menangani dana desa harus dipertanggungjawabkan. Wali amanat (agen) berutang kepada wali amanat (prinsipal) untuk bertanggung jawab atas, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatannya dan yang termasuk dalam ruang lingkupnya. Beberapa hal mempengaruhi akuntabilitas yang baik antara lain pada penelitian [Indriasih & Sulistyowati, \(2022\)](#) menemukan bahwa aksesibilitas berpengaruh pada tugas pengelolaan dana daerah. Meningkatnya aksesibilitas pengelolaan keuangan desa berdampak positif terhadap akuntabilitasnya. Salah satu cara untuk mewujudkan hak masyarakat atas kemudahan akses informasi adalah dengan membuat media informasi pengelolaan keuangan desa lebih mudah tersedia. Ini dapat mengurangi ketidakpercayaan publik terhadap otoritas desa dengan menawarkan sumber informasi.

Akuntabilitas dalam penanganan dana desa juga dipengaruhi oleh mekanisme pengendalian internal pemerintah. Sistem pengendalian intern pemerintah mengacu pada prosedur yang diikuti secara internal untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan ([Hendaris & Siraz, 2020](#)). Operasi pengelolaan keuangan desa dapat dipantau oleh sistem pengendalian internal pemerintah untuk melihat apakah mereka mematuhi hukum yang berlaku. Sistem pengendalian yang mapan akan menjamin kebenaran laporan keuangan desa, sehingga menimbulkan tanggung jawab yang tinggi.

[Indriasih & Sulistyowati, \(2022\)](#) menyatakan bahwa transparansi disebut sebagai salah satu elemen administrasi dana desa yang efisien. Jika pemerintah desa menerima informasi yang diberikan oleh masyarakat, hubungan akan berkembang yang akan memungkinkan pengelolaan dana desa dan penciptaan akuntabilitas yang sempurna. Kemampuan pemerintah desa untuk mengelola keuangan daerah secara efektif ditunjukkan oleh tingkat transparansi yang tinggi. Selain ketiga aspek tersebut, menurut [Natsir dkk. \(2021\)](#) penggunaan teknologi informasi juga berdampak pada tanggung jawab pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa menggunakan teknologi informasi sebagai alat untuk bekerja ketika membuat laporan keuangan untuk desa dan untuk mengelola semua surat kabar lokal. Untuk memungkinkan perangkat desa mengirim data lebih cepat daripada melalui proses manual. Dengan mengurangi potensi kesalahan, penggunaan komputer ini meningkatkan ketepatan dan akurasi hasil operasi data. Hal ini akan membuat pengelolaan uang desa lebih bertanggung jawab.

Menurut penelitian [Indriasih et al. \(2022\)](#), akuntabilitas pengelolaan dana desa ditingkatkan melalui aksesibilitas, pengendalian internal, dan transparansi. Beberapa peneliti telah mempelajari topik ini., [Dewi Yenti Astari dkk. \(2021\)](#) menunjukkan dampak menguntungkan dari penggunaan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. [Siagan dkk. \(2022\)](#) menjelaskan bahwa peningkatan keterbukaan meningkatkan keandalan pertukaran mata uang. [Arfiansyah \(2020\)](#) menunjukkan bagaimana mekanisme pengendalian internal pemerintah mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan anggaran desa dengan cara yang menguntungkan. [Adelia & Harahap \(2022\)](#) menunjukkan bagaimana pemanfaatan teknologi informasi membuat administrasi keuangan daerah lebih akuntabel.

Mempertimbangkan berbagai penelitian terdahulu serta besaran dana desa yang tidak dipergunakan semestinya di berbagai daerah di Indonesia terutama di Kabupaten Lebong, penulis ingin memeriksa kembali peristiwa yang terjadi serta kesimpulan dari penelitian sebelumnya. Peneliti kemudian memilih judul yaitu “Pengaruh Aksesibilitas, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Transparansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”.

Kajian Literatur

Teori Keagenan

Menurut [Jensen dan Meckling \(1976\)](#), teori agensi menggambarkan interaksi antara prinsipal dan agen. Teori ini menyatakan bahwa prinsipal dan agen memiliki pengaturan kerja formal. Menurut teori agensi, tidak ada yang dapat diandalkan untuk beroperasi demi kepentingan terbaik prinsipal karena setiap orang semata-mata termotivasi oleh kepentingan mereka sendiri sehingga menyebabkan benturan kepentingan antara agen dan prinsipal.

Pemerintah desa beroperasi sebagai agen dengan pengetahuan mendalam yang lebih besar daripada masyarakat (prinsipal) yang mengakibatkan kesenjangan informasi. Pemerintah yang memiliki lebih banyak informasi cenderung bertindak demi kepentingan terbaik mereka sendiri. Masyarakat merasa terkendala untuk mengatur tindakan yang diambil oleh pemerintah desa karena kurangnya informasi yang telah dikumpulkan. Oleh karena itu, masyarakat harus menerima informasi lengkap dari para pemimpin desa. Kesenjangan informasi antara pemerintah desa dan warga dapat menyebabkan kewajiban pengelolaan keuangan daerah terganggu.

Akuntabilitas pengelolaan anggaran desa menunjukkan bagaimana penelitian dan teori kelembagaan ini terkait. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, yang berfungsi sebagai pihak yang diberi mandat (prinsipal), pemerintah desa beroperasi sebagai pihak yang diberi mandat (agen). Pemerintah desa, yang menyelenggarakan pemerintahan desa, bertanggung jawab untuk memastikan tanggung jawab atas administrasi dana desa dan untuk membuat seluruh laporan keuangan desa tersedia untuk umum. Kegiatan dan kewajiban mereka harus dilaporkan secara transparan kepada publik, dan mereka harus memberikan informasi yang jelas tentang laporan pengelolaan anggaran desa. Peningkatan akuntabilitas dan berbagi informasi dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi yang ada antara pemerintah desa dan penduduk setempat. Semakin rendah kesenjangan informasi, semakin sulit bagi desa untuk menangani keuangan mereka.

Aksesibilitas

Salah satu strategi untuk mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat umum adalah melalui aksesibilitas. Menyediakan pihak yang berkepentingan dengan akses mudah membuatnya mudah bagi mereka untuk mempelajari lebih lanjut. Untuk membuat pilihan dan mendorong akuntabilitas, pemerintah desa harus membuat informasi dapat diakses. Menurut teori keagenan, pemerintah desa berfungsi sebagai kepala sekolah dan agen dengan kekuatan untuk memberi tahu masyarakat tentang informasi terkait. Akses ke semua informasi yang tersedia diperlukan untuk mencapai akuntabilitas dan membatasi timbulnya kesenjangan informasi dan untuk mencegah miskomunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Penelitian dari [Indriasih & Sulistyowati, \(2022\)](#) dan [Hasibuan & Nurhayati \(2020\)](#) menunjukkan dampak aksesibilitas yang menguntungkan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Pernyataan berikut dapat dibuat berdasarkan pembenaran di atas.

H₁ : Aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem pengendalian internal pemerintah adalah rantai peristiwa yang terjadi di dalam perusahaan. Orang yang terlibat dalam kegiatan dan tindakan semacam itu mampu mencapai tujuan organisasi yang sehat. Untuk mencegah kecurangan, pengendalian internal melibatkan pemantauan, pengelolaan, dan pengukuran sumber daya manusia. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang kuat dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap kaliber pekerjaan dan

laporan keuangan desa ([Panjaitan et al., 2022](#)). Menurut teori keagenan, pemerintahan desa yang telah disetujui untuk mentransfer dana desa perlu dilindungi oleh sistem pengendalian internal agar dapat menjalankan mandat dan fungsinya sesuai dengan hukum dan keinginan masyarakat umum. Efektivitas mekanisme internal pemerintah untuk menghasilkan keputusan mempengaruhi kemampuan untuk memperhitungkan penanganan data.

Sistem pengendalian internal akan meningkatkan akuntabilitas dan berdampak pada pilihan pemerintah desa. Penelitian [Indriasih dkk. dari tahun 2022](#) menunjukkan seberapa baik mekanisme pengendalian internal memastikan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sumber daya organisasi dapat dilacak, diamati, dan dinilai menggunakan sistem pengendalian internal. Peneliti [Dwipayani & Hutnaleontina dan Arfiansyah](#) menemukan bahwa pada tahun 2022 dan 2020, masing-masing, pengendalian internal pemerintah berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Pernyataan berikut dapat dibuat berdasarkan pembenaran yang disebutkan di atas.

H₂ : Sistem pengendalian internal pemerintah terhadap transparansi pengelolaan anggaran desa sangat baik

Transparansi

Transparansi mengacu pada kesediaan pemerintah desa untuk terlibat dalam semua kegiatan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi kemungkinan kesenjangan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Pengungkapan informasi kepada publik oleh pemerintah dalam upaya mengurangi kecurangan dan kesalahan pelaporan keuangan. Hal ini sejalan dengan teori keagenan, yang menurutnya pemerintah desa wajib menginformasikan kepada masyarakat segala kegiatan dan aktivitas yang dilakukan dimana masyarakat dapat berkiprah agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah desa dan masyarakat. Berbagi informasi mencakup laporan keuangan dan transparansi perencanaan pengembangan masyarakat. Kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa dan mencegah kecurigaan atau kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Transparansi yang baik dapat membantu mengembangkan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Penelitian [Indriasih dan Sulistyowati](#) menunjukkan bahwa dengan meningkatnya keterbukaan akan berdampak positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Ini ditunjukkan dalam studi 2022 mereka. Menurut [Maghfira et al. \(2021\)](#), transparansi secara signifikan dan menguntungkan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Pernyataan berikut dapat dibuat berdasarkan pembenaran di atas.

H₃ : Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam rangka membantu dan mendukung pemerintah desa dalam melaksanakan tugas atau operasional secara cepat dan akurat, teknologi informasi telah diterapkan di setiap departemen dan lembaga. Pemerintah desa harus memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mempromosikan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan membuatnya lebih mudah untuk mengirim dan menerima informasi. Teknologi dimanfaatkan untuk memperoleh data, mengirim, mengolah, menyimpan dan menggunakan data serta mempermudah dalam menerima dan menyampaikan informasi kepada publik. Menurut teori keagenan, lebih mudah bagi pemerintah desa untuk memenuhi tugasnya melayani masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dalam mengelola dana desa ketika bertindak sebagai agen. Teknologi informasi mempercepat penyajian laporan keuangan dan menghindari kesalahan dengan mencatat pengelolaan keuangan desa secara cermat sehingga pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. Peneliti [Dewi et al. \(2021\)](#) dan [Natsir et al. \(2021\)](#) menemukan bahwa akuntabilitas administrasi dana desa dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pemanfaatan teknologi informasi. Atas dasar argumen yang disebutkan di atas, klaim berikut dapat dibuat.

H₄ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada pemerintah desa. Objek dalam penelitian ini adalah kabupaten Lebong, adapun populasi penelitian ini terdiri dari 93 desa di 12 kecamatan di Kabupaten Lebong. sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria berikut : 1. Masyarakat yang menerima uang tunai dari desa 2. Desa di Kecamatan Lebong Utara, Amen, Uram Jaya, Pelabai, Lebong Atas, dan Lebong Tengah Kabupaten Lebong. mengingat desa-desa di Kabupaten Lebong tersebar di wilayah yang luas. 3. Bendahara desa adalah responden.

Variabel akuntabilitas diukur dengan dengan 4 indikator : 1). pertanggungjawaban kejujuran dan hukum, 2). pertanggungjawaban proses, 3). peranggungjawaban proses, 4). pertanggungjawaban kebijakan. indikator ini mengacu pada peneitian [Mulyanto et al., \(2021\)](#). Variabel aksesibilitas diukur dengan 3 indikator : 1). terbuka di media massa, 2). mudah diakses, 3). ketersediaan informasi. Mengacu pada penelitian [Superdi et al., \(2017\)](#).

Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah diukur dengan 5 indikator : 1). Lingkungan pengendalian, 2). Penilaian risiko, 3). kegiatan pengendalian, 4). informasi dan komunikasi, 5). Pemantauan ([Indriasih & Sulistyowati, 2022](#)). Variabel Transparansi diukur dengan 4 indikator : 1). penyediaan akses informasi, 2). musyawarah, 3). keterbukaan pengelolaan, 4). keterbukaan dokumen. ([Kholifah, 2020](#)) variabel pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan 5 indikator : 1). proses kerja secara elektronik, 2). pengelolaan dan penyimpanan data keuangan, 3). pengolahan informasi dengan jaringan internet, 4). sistem manajemen, 5). perawatan dan pemeliharaan perangkat komputer. ([Wardani & Andriyani, 2017](#)).

Pada penelitian ini analisis, pengelolaan dan pengujian hipotesis dilakukan menggunakan alat bantu *Software Microsoft Excel* dan *Statistical Product and Service Solution (SPSS)* yaitu statistik deskriptif, uji kualitas data (validitas, reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, heterokedastisitas, multilinearitas) dan uji hipotesis.

Hasil

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada masing-masing bendahara di 49 desa yang tersebar di 6 Kecamatan di Kabupaten Lebong. Penyebaran kuesioner dimulai dari tanggal 11 Mei 2023 dan selesai pada tanggal 29 Mei 2023. Proses penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi langsung responden dengan memberikan kuesioner serta surat izin untuk melakukan penelitian. Pengembalian kuesioner yang sudah terisi dilakukan secara langsung setelah mengisi kuesioner sehingga jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 49 kuesioner dan kuesioner yang kembali sebanyak 49 kuesioner juga dengan persentase 100%. Respon perangkat desa terhadap penelitian ini cukup baik dilihat dari kuesioner yang dibebarkan diisi semua oleh responden. Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif dari variabel penelitian ini.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Kisaran Teoritis			Kisaran Aktual			Standar Deviasi
		Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	
Aksesibilitas	49	5	25	15	18	25	21,29	1,837
SPIP	49	19	95	57	76	90	85,82	3,039
Transparansi	49	8	40	24	31	39	33,84	2,648
PTI	49	9	45	27	29	43	36,49	2,807
Akuntabilitas	49	8	40	24	32	40	35,27	2,361

Sumber : Data diolah, 2023

Langkah awal analisis data adalah melakukan uji validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Hasil uji validitas memperlihatkan bahwa semua pernyataan dalam penelitian ini valid semua dibuktikan dengan nilai signifikansi setiap pernyataan di bawah 0,05. Selanjutnya, Tabel 2 menunjukkan data yang diperoleh reliabel dengan hasil cronbach alpha di atas 0,05.

Tabel 2. Uji reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Aksesibilitas	0,709	Reliabel
SPIP	0,709	Reliabel
Transparansi	0,866	Reliabel
PTI	0,791	Reliabel
Akuntabilitas	0,753	Reliabel

Sumber : Data diolah, 2023

Selanjutnya juga dilakukan uji asumsi klasik sebelum uji hipotesis. Asumsi normalitas terpenuhi dengan hasil pengujian menunjukkan data terdistribusi secara normal. Hal ini dilihat dari uji *Kolmogorov smirnov* yang menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0,2 yang lebih besar dari 0,05. Tabel 3 menunjukkan tidak adanya masalah multikolinearitas pada data yang diperoleh.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Aksesibilitas	0,601	1,663
SPIP	0,820	1,220
Transparansi	0,690	1,449
PTI	0,643	1,556

Sumber : data diolah, 2023

Juga Tabel 4 menunjukkan tidak adanya masalah heterokedastisitas pada data penelitian ini. Dengan demikian, data dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

Tabel 4. Uji heteroskedastisitas

Variabel	Signifikan	Keterangan
Aksesibilitas	0,558	Bebas Heteroskedastisitas
SPIP	0,637	Bebas Heteroskedastisitas
Transparansi	0,143	Bebas Heteroskedastisitas
PTI	0,732	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber : Data Diolah, 2023

Tabel 3 di bawah menyajikan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini.

Tabel 5. Uji hipotesis

Variabel	Koefisien	t-statistik	Sig.	Keterangan
Aksesibilitas	-1,684	-2,123	0,039	Ditolak
SPIP	4,170	2,560	0,014	Diterima
Transparansi	5,640	6,612	0,000	Diterima
PTI	11,717	13,905	0,000	Diterima
Adjusted R ²	0,835			
F	61,785			
Sig	0,000			

Sumber : data diolah, 2023

Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel aksesibilitas berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang berarti H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya akses yang diberikan dalam menyajikan pengelolaan keuangan daerah bagi para penggunanya.

Hal ini sejalan dengan teori keagenan, pemerintah desa sebagai agen yang diberi wewenang untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai prinsipal. Dimana untuk mencapai akuntabilitas dan mengurangi terjadinya kesenjangan informasi maka diperlukan akses untuk memberikan semua informasi yang ada agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah

desa dan masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Indriasih & Sultyowati \(2022\)](#), [Hasibuan Sarah & Nurhayati \(2020\)](#) yang menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini membuktikan bahwa H_2 diterima. Semakin baik penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang dimiliki maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga semakin baik. Rata-rata responden memberikan jawaban sangat setuju pada pernyataan dalam kuesioner hal ini berarti responden menilai sistem pengendalian internal pemerintah sudah berjalan dengan efektif sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang lebih baik.

Lingkungan pengendalian yang meliputi pembentukan struktur yang sesuai dengan kebutuhan, penegakan nilai etika dan kejelasan wewenang dan tanggung jawab, semua ini mendukung lingkungan pengendalian yang baik. Penilaian risiko yang meliputi identifikasi risiko dimana pihak yang bertanggungjawab akan mengidentifikasi risiko yang ada kemudian menganalisis risiko, apakah risiko tersebut memiliki dampak. Kegiatan pengendalian perlu dilakukan untuk meminimalisasi risiko yang ada dan memastikan kegiatan pengendalian sudah berjalan dengan baik, adanya informasi dan komunikasi yang diberikan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara pemerintah desa dan publik. Sistem pengendalian juga harus dilakukan pemantauan sehingga tujuan suatu instansi dapat tercapai. Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sudah berjalan dengan baik sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa juga semakin baik.

Sistem pengendalian internal yang dilaksanakan secara optimal dan terus-menerus oleh pemerintah desa akan memberikan keyakinan atas tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin baik.

Teori keagenan menjelaskan pemerintah desa sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola keuangan desa harus diawasi dengan sistem pengendalian internal agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada. Sistem pengendalian internal pemerintah yang efektif berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah akan menciptakan proses kegiatan yang baik, sehingga akan memberikan keyakinan bagi publik bahwa aktivitas yang dilaksanakan telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Penerapan sistem pengendalian internal juga dapat mewujudkan tujuan instansi dan mengawasi pemerintah desa agar dalam menjalankan tugasnya dengan baik sehingga mendorong pengelolaan dana desa yang akuntabel.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian [Indriasih et al., \(2022\)](#), [Dwipayani & Hutnaleontina \(2022\)](#) dan [Arfiansyah \(2020\)](#) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Transparansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka H_3 diterima. Semakin baik transparansi yang diterapkan maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga semakin baik. Rata-rata responden memberikan jawaban sangat setuju pada pernyataan dalam kuesioner hal ini berarti responden menilai penerapan transparansi sudah berjalan dengan baik sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang lebih baik.

Penyediaan akses informasi meliputi rincian pengelolaan dana desa yang bisa dilihat dipapan pengumuman yang ada di kantor desa. Musyawarah yang melibatkan masyarakat dan masyarakat juga dapat berpartisipasi, keterbukaan pengelolaan meliputi pengelolaan keuangan desa diketahui oleh

masyarakat. Keterbukaan dokumen meliputi dokumen pengelolaan dana desa dibuat sesuai dengan yang sebenarnya.

Keterbukaan pemerintah desa dalam membuat kebijakan anggaran keuangan desa yang bisa diketahui oleh publik atau masyarakat dan para pengguna laporan keuangan memudahkan publik untuk mencermati, mengevaluasi kebijakan anggaran mulai dari proses perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian pemerintah desa dapat berjalan dengan baik dan bersih, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa semakin meningkat dan menciptakan akuntabilitas yang lebih baik.

Hal ini sesuai dengan teori keagenan, dimana pemerintah desa harus memberikan semua informasi terkait aktivitas dan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat dimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah desa dan masyarakat. Keterbukaan informasi tidak hanya terbuka tentang laporan keuangan tetapi juga keterbukaan tentang perencanaan pembangunan desa, kegiatan yang melibatkan masyarakat sehingga kinerja pemerintah desa menjadi lebih baik dan tidak memunculkan kecurigaan atau kesalahpahaman dari masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Maghfira dkk \(2021\)](#) dan [Indriasih & Sultyowati \(2022\)](#) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang berarti H_4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga semakin baik. Hal ini didukung dengan statistik deskriptif, dimana rata-rata responden memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan yang diberikan yang berarti pemanfaatan teknologi informasi sudah dinilai baik oleh pemerintah desa kabupaten Lebong.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa indikator pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dibuktikan dengan proses kerja secara elektronik yang memiliki komputer yang cukup dan tersedia digunakan dalam melakukan segala aktivitas. Pengelolaan dan penyimpanan data keuangan yang meliputi proses awal pengelolaan keuangan hingga pembuatan laporan keuangan yang dilakukan secara komputerisasi. Pengelolaan informasi dengan jaringan internet, dimana di setiap desa sudah memiliki jaringan internet dengan kapasitas yang memadai yang dimanfaatkan untuk mengolah data serta menerima dan menyampaikan informasi kepada publik. Sistem manajemen yang meliputi penggunaan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang baik. Perawatan dan pemeliharaan perangkat komputer dengan melakukan pencatatan kemudian memperbaiki perangkat yang rusak dengan tepat waktu, memiliki sistem keamanan komputer.

Pemanfaatan teknologi informasi membantu mempercepat proses pengelolaan keuangan desa hingga penyajian laporan keuangan sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa karena pengelolaan keuangan desa akan tercatat secara sistematis sehingga pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya teknologi informasi memberikan kemudahan perekapan dan pengelolaan anggaran desa. Memanfaatkan kemajuan teknologi maka informasi yang dibutuhkan oleh publik dapat tersedia dengan cepat dan akurat, dengan adanya teknologi dapat mempermudah dalam mengelola dan menyajikan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan, pemerintah desa sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, mempertanggungjawabkan semua wewenang yang sudah diamanahkan sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik pemerintah dapat memberikan informasi dengan mudah kepada masyarakat

sehingga masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi-informasi yang diberikan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai agen lebih mudah menjalankan kewajibannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Dewi dkk. \(2021\)](#) dan [Natsir dkk. \(\(2021\)\)](#) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, aksesibilitas berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kemudahan akses yang diberikan pemerintah desa kepada publik. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengendalian internal yang diterapkan oleh pemerintah desa maka akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa semakin efektif dan baik. Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi transparansi maka semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan pemerintah desa dalam memanfaatkan teknologi informasi maka semakin baik juga akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penelitian ini memiliki implikasi sebagai berikut: Bagi pemerintah desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai rujukan atau bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai pentingnya mempertanggungjawab pengelolaan dana desa serta sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas dana desa. Bagi teori, penelitian ini membuktikan bahwa teori keagenan sejalan dengan variabel sistem pengendalian internal, transparansi dan pemanfaatan teknologi informasi yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan bahan perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan topik yang sama yang berkaitan dengan akuntabilitas dana desa.

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang dapat diperbaiki oleh peneliti selanjutnya, yang akan melakukan penelitian sejenis. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut, Pernyataan-pernyataan didalam kuesioner variabel aksesibilitas dalam penelitian ini masih kurang tepat menjelaskan variabel aksesibilitas

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memilih pernyataan-pernyataan dalam kuesioner variabel aksesibilitas, agar kuesioner yang disebarakan sesuai dengan responden yang dituju.

Daftar Pustaka

- Abdullah, & Winanda, W. N. (2022). *Financial Management Accountability of Sawang Lebar Ilir Village North Bengkulu Regency. Miicema 2019*, 328–338.
- Adelia, A. P., & Harahap, W. S. M. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi & Manajemen*, 2(1), 156–168.
- Afifi, Z., Mulyanto, & Nugroho, D. H. (2021). The Effect of Internal Control System And Village apparatus Competence On Village Fund Management Accountability. *Jurnal Magister Administrasi*. 2021(3), 1120–1124.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>

- Bengkulu.bpk.go.id.2019."Kades Nangai amen Terancam Dipecat" <https://bengkulu.bpk.go.id/kades-nangai-amen-terancam-dipecat/>, diakses pada 18 Oktober 2022.
- Dewi, Y. A., Nasfi, & Yuliza, M. (2021). Internal Control System, Utilization of Accounting Information Technology, on Village Fund Management Accountability. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(1), 190–203. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v5i1.2040>
- Dwipayani, N. K. S., & Hutnaleontina, P. N. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Sekecamatan Marga Kabupaten Tabanan. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 139–151. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i1.2281>
- Fransisca, E. (2019). Lampiran Kuisisioner Penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Hardiningsih, P., O., R. M., Srimindarti, C., & Kristiana, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 21. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i1.4963>
- Hasibuan, S., & Nurhayati. (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Di Desa Sialang Rindanf Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. 2. <https://doi.org/10.30606/hirarki.v2i1.333>
- Hendaris, R. B., & Siraz, R. (2020). Analysis Of Factor Influencing The Accountability Of Village Funds Management. 35(4), 51–63. <https://doi.org/10.31933/dijemss.v1i3.171>
- Humaeroh, S., Jumiaty, I. E., Maulana, D. (2022) Analisis Transparansi dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa pada Desa Muruy kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. *Jurnal Moderat*. 8(1), 79-91. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2595>
- Indriasih, D., Fajri, A., & Febriana, D. (2022). Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 972–981. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1331>
- Indriasih, D., & Sulistyowati, wiwit A. (2022). The Role of Commitment, Competence, Internal Control system, Transparency and Accessibility in Predicting the Accountability of Village Fund Management. *The Indonesian Accounting Review*, 12(1), 73. <https://doi.org/10.14414/tiar.v12i1.2650>
- Janie, D. N. A. (2012). *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda Dengan SPSS*.
- Janna, N. M., & Herianto. (2021). Konsep Uji Validitas Dan Reliabilitas Dengan Menggunakan SPSS. *Jurnal Darul Dakwah Wal-Irsyad (DDI)*, 18210047, 1–12. <https://doi.org/10.31219/osf.io/v9j52>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theori Of The Firm : Managerial Behavior, agency Costs And Ownership Structure. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696.
- Kholifah, N. N. (2020). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Kinerja Pemerintah Desa Sebagai Mediasi (Studi Kasus pada Perangkat Desa di Kecamatan Sumber dan Kecamatan Remba. 1–88.
- Koto ,N. S.A. (2019). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervening.
- Lianto Naufal (2018). *Kuisisioner Penelitian Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*.
- Maghfira, R. N., Nirwana, & Kusuma, A. (2021). the Effect of Transparency and Utilization of Regional Financial Accounting Information Systems on Budget Management Accountability in Gowa Regional Government. *SSRN Electronic Journal*.
- Marlina, E., Rahmayanti, S., & Putri, A. D. R. A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(1), 89–100. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2517>

- Mulyanto, Budiman, N. andriyani, & Fahmi, M. N. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variab. *JBE (Jurnal Bingkai Ekonomi)*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.54066/jbe.v6i1.90>
- Natsir, M., Diantimala, Y., & A. Djalil, M. (2021). the Influence of Understanding of Financial Management Apparatus, the Utilization of Information Technology and Internal Control System on the Accountability of Village Fund Management in Aceh Singkil District, Province of Aceh, Indonesia. *International Journal of Business Management and Economic Review*, 04(06), 198–208. <https://doi.org/10.35409/IJBMER.2021.3334>
- Panjaitan, R. S., Simanjuntak, A., Sembiring, Y. N., & Siahaan, S. B. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Desa Motung, Pardumuan). *Jurnal Manajemen*, 8(1), p-ISSN. <https://doi.org/10.22437/jaku.v8i1.27507>
- Peraturan Bupati Lebong. (2021). *Peraturan Bupati Lebong tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2021 (Perbup Nomor 15 Tahun 2021)*.
- Peraturan Bupati Lebong. (2022). *Peraturan Bupati Lebong tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2022 (Perbup Nomor 11 Tahun 2022)*.
- Peraturan Daerah. (2017). *Peraturan Daerah Kabupaten Lebong tentang Perangkat Desa (Perda Nomor 10 Tahun 2017)*.
- Permendagri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018)*.
- PP (2008) *Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (PP Nomor 60 Tahun 2008)*
- Perdana, E. (2016). Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22. In *Lab Kom Manajemen Fe Ubb*.
- Radarlebong.2022. "Kades Gandung Diminta Kembalikan SILPA Rp306 Juta", <https://radarlebong.disway.id/read/259921/kades-gandung-diminta-kembalikan-silpa-rp-306-juta>. Diakses pada 18 Oktober 2022.
- Siagian, L. N., Simanjuntak, A., & Situmorang, D. R. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa tanjung Gusta, Desa Sunggal Kanan dan Desa Sei Mencirim). *Jurnal Manajemen*, 8(6), 1–16.
- Superdi, Rasuli, M., & Silfi, A. (2017). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. <https://doi.org/10.30596/jakk.v6i1.14377>
- Ubaidillah, M., & Cahayuni, M. (2022). The Role of Leadership Style in Organizational Culture and Competence to Improve Village Fund Management Accountability. *Journal of Business and Management Review*, 3(1), 082–093. <https://doi.org/10.47153/ibmr31.3012022>
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88–98. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270>
- Yesinia, N. I., Yulianti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1), 95–104. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.13112>
- Temalagi, Selvi & Annakota Monica, F (2017) *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*